

Judul : Antisipasi bencana: catat, dewan janji bakal tambah anggaran BMKG
Tanggal : Jumat, 28 Desember 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Antisipasi Bencana

Catat, Dewan Janji Bakal Tambah Anggaran BMKG

Bencana tsunami Selat Sunda, Sabtu lalu, menggugah Komisi V DPR untuk menguatkan sisi antisipasi dan peringatan dini. Komisi V DPR pun berjanji menambah anggaran untuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), salah satu badan yang bertugas melakukan mitigasi bencana.

"Ya, kami akan mendorong untuk anggaran BMKG dilebihkan. Biar tidak terjadi lagi kekeliruan dalam peringatan dini kepada masyarakat saat bencana, terutama tsunami," kata anggota Komisi V DPR Anton Sihombing seperti dikutip *RMOL*.

Sebelumnya, BMKG memang mengeluhkan kurangnya anggaran. Akibat anggaran minim, BMKG tidak bisa memperbaiki alat-alat untuk mendeteksi bencana. Dampaknya, BMKG keliru dalam mendeteksi tsunami Selat Sunda yang dipicu aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Di awal peristiwa, BMKG mengumumkan bahwa bencana yang melanda Banten dan Lampung itu merupakan gelombang pasang yang didorong bulan purnama.

Kata Anton, sebenarnya bukan kali ini saja BMKG mengeluhkan kurangnya anggaran.

Pada dua bencana sebelumnya, yakni gempa di Lombok dan tsunami Palu, BMKG sudah mengeluhkan hal serupa. "Mulai dari kejadian gempa di Lombok dan Palu, mereka mengatakan selalu kurang," ujar politisi Partai Golkar ini.

Anton juga mengimbau kepada Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman, turun tangan mengatasi keluhan BMKG tersebut. "Saya kira harus ada diskresi langsung dari Presiden melalui Kemenko Kemaritiman. Saya rasa mereka sudah ambil langkah tegas supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti ini," pungkasnya.

Anggota Komisi V Bambang Haryo menimpali. Kata politisi Gerindra ini, Komisi V sebenarnya sudah menyetujui penambahan anggaran untuk BMKG di 2019 menjadi Rp 2,9

triliun. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak penambahan itu.

"Anggaran 2019 yang diajukan bisa dipenuhi kalau Kemenkeu dan DPR setuju. DPR sudah menyetujui anggaran Rp 2,9 triliun untuk BMKG, tapi Kemenkeu hanya menyetujui Rp 1,7 triliun," ujarnya.

Bambang mengakui, fraksinya sempat memprotes keras Kemenkeu cuma memberi alokasi anggaran BMKG senilai Rp 1,7 triliun. Sebab, angka itu tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. "Kami dari Fraksi Gerindra sempat *walk out* saat itu. Karena bagi kami, ini (penambahan anggaran BMKG) untuk kepentingan nyawa publik. Ini enggak bisa ditawar-tawar," cetusnya.

Akibat kurangnya anggaran, tambah dia, BMKG terlihat tidak siap dalam memberikan peringatan dini sebuah bencana. Tsunami Selat Sunda contoh nyatanya. BMKG salah menginformasikan bahwa yang terjadi akibat rusaknya alat pendeteksi yang mereka miliki. "Ya bagaimana mau merawat peralatan dan menambah baru kalau anggarannya tidak cukup,"

tandas Bambang.

Anton Sihombing juga ikut mengomentari mengenai alat pendeteksi tsunami. Dia sedih karena alat itu banyak yang tidak berfungsi. Banyak pula yang dicuri. Padahal, peran alat itu sangat

penting bagi Indonesia, untuk mengantisipasi bencana. "Kita malu, masak alat deteksi tidak berfungsi. Padahal, negara lain tahu bahwa wilayah kita rawan gempa dan berpotensi menimbulkan tsunami," untkannya. ■ *RMOL*